

Peran Kelompok Elit Siloviki Pada Politik Kontemporer Rusia

Luthfi Novian¹, Indra Fauzan^{*2}

^{1,2} Department of Political Science, Faculty of Social and Political Science, University of Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: indra.fauzan@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 March 2024

Revised 07 January 2025

Accepted 25 January 2025

Available online 29 January 2025

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Fauzan, I. (2025). Peran Kelompok Elit Siloviki Pada Politik Kontemporer Rusia. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 17(1), 41-49.

ABSTRACT

The wave of democratisation that occurred at the end of the 20th century brought Russia towards a democratic direction. However, in its development, Russia's democratisation did not proceed smoothly, as seen by the persistence of undemocratic elements such as the siloviki. The transformed siloviki themselves managed to take over Russia systematically from within and brought a reversal for Russia's democratisation. With the siloviki in charge, which is an undemocratic element, Russian democracy itself is threatened with failure. This research aims to see how this siloviki elite has transformed contemporary Russian politics and its impact on Russian democracy. By exploring the roles they have in the political, security, military and economic fields. This research is literature research with descriptive analysis. This research uses democratisation theory by Huntington and elite theory by Mosca as analytical tools. The conclusion of this research shows that siloviki are the main cause of the reversal of democratisation experienced by Russia, the low quality of democracy and Russia becoming an unfree country, and they have succeeded in occupying high positions in government and state companies.

Keyword: Democratisation, Siloviki, Russia, Transformation, Elite, Putin.

ABSTRAK

Gelombang demokratisasi yang terjadi pada akhir abad ke-20 membawa Rusia menuju ke arah demokrasi. Namun dalam perkembangannya, demokratisasi di Rusia tidak berjalan mulus, hal ini terlihat dari masih adanya elemen-elemen yang tidak demokratis seperti siloviki. Siloviki yang telah bertransformasi berhasil mengambil alih Rusia secara sistematis dari dalam dan membawa pembalikan bagi demokratisasi Rusia. Dengan adanya siloviki yang memimpin, yang merupakan elemen tidak demokratis, demokrasi Rusia sendiri terancam gagal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana elit siloviki ini mentransformasi politik kontemporer Rusia dan dampaknya terhadap demokrasi Rusia. Dengan menjajaki peran yang mereka miliki di bidang politik, keamanan, militer, dan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori demokratisasi dari Huntington dan teori elit dari Mosca sebagai alat analisisnya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa siloviki menjadi penyebab utama pembalikan demokratisasi yang dialami Rusia, rendahnya kualitas demokrasi dan Rusia menjadi negara yang tidak bebas, serta berhasil menduduki jabatan tinggi di pemerintahan dan perusahaan negara.

Keyword: Demokratisasi, Siloviki Rusia, Transformation, Elite, Putin.



This work is licensed under a Creative

Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

1. Introduction

Fenomena penting dari gelombang demokratisasi ketiga adalah runtuhnya rezim totalitarian Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur. Kehancuran ekonomi melanda negara-negara komunis Eropa Timur dan Uni Soviet, kegagalan pemerintah komunis dalam mensejahterahkan masyarakat, perbedaan kualitas hidup yang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Barat. Kegagalan pada pemerintahan Presiden Gorbachev mengenai kebijakan *Glasnost*, *Perestorika* dan *Demokratizatsiya* yang justru membawa Rusia ke jurang perpecahan, krisis politik dan ekonomi (Huntington, 1993).

Boris Yeltsin muncul sebagai sosok reformis liberal dan Presiden pertama Federasi Rusia, melakukan reformasi politik dan ekonomi untuk mengubah arah Rusia menuju demokratisasi. Reformasi politik dengan memberikan hak-hak politik, pemilihan Duma dan Presiden, perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan media. Serta reformasi ekonomi dengan melakukan liberalisasi, menerapkan *shock therapy* dengan melakukan privatisasi besar-besaran terhadap perusahaan milik negara (Alkatiri, 2007).

Namun, demokratisasi Rusia tidaklah berjalan dengan mulus terjadinya krisis konstitusional pada 1993 yang membuat Yeltsin dengan terpaksa menggunakan cara-cara otoriter untuk mengkonsolidasikan landasan dasar konstitusi Rusia. Meski demikian juga, pada tahun 1996 keadaan politik Rusia semakin tidak stabil disebabkan tidak adanya konsolidasi demokrasi dengan seluruh pihak di Rusia. Keadaan memburuk dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Yeltsin menjadi tokoh yang tidak populer disebabkan liberalisasi ekonomi yang hanya menguntungkan para oligarki seperti; Mikhail Khordokovsky, Boris Berezovsky dan Vladimir Gusinsky. Boris Yeltsin sendiri mengasosiasikan dirinya dengan para oligarki ini melalui jaringan *The Family*. Yeltsin yang semakin tidak populer terpaksa bertumpu pada kekuatan oligarki untuk mempertahankan kekuasaannya.

Adapun juga kegagalan dari Boris Yeltsin untuk sepenuhnya menghilangkan KGB dari kontemporer Rusia, melainkan yang terjadi adalah KGB ditransformasi menjadi berbagai serpihan ke dalam kerangka badan keamanan baru seperti; FSB dan SVR. Perubahan ini juga tidak merubah fakta bahwa eks KGB masih menduduki posisi yang sama meski dengan institusi yang berbeda. Fakta bahwa instrumen represi di Rusia tidak sepenuhnya hilang membuka peluang untuk restorasi. Yeltsin membuat kesalahan terbesarnya dengan masih menggunakan para eks KGB dan militer ke dalam pemerintahannya. Mereka dijuluki *Siloviki* (*men of force*) dengan seoran mantan Letnan Kolonel KGB Vladimir Putin menjadi *siloviki* dengan karir yang meroket di masa Yeltsin dengan menjadi Direktur FSB (penerus KGB) 1998-1999 dan menjadi Perdana Menteri 1999, hingga ditunjuk oleh Boris Yeltsin sebagai penerusnya.

Terpilihnya Vladimir Putin pada Maret tahun 2000 sebagai Presiden Federasi Rusia, penunjukan politisi dan pejabat tinggi dengan latar belakang struktur angkatan bersenjata yang disebut *siloviki* telah menarik perhatian para analis akademik dan jurnalis baik di Rusia maupun di Barat. Salah satu interpretasi yang dominan mengenai fenomena ini menilai bahwa penunjukan atau pengangkatan personel yang berlatarbelakangkan dari angkatan bersenjata yang kebanyakan eks-KGB merupakan strategi politik yang disengaja dan sebagai ekspresi kebijakan menuju arah yang lebih otoriter oleh Putin di mana dirinya sendiri merupakan mantan petugas dari KGB (Rentz, 2007).

Hal ini menjadi dan merupakan paradigma dominan untuk memahami politik kontemporer Rusia, di mana selama masa jabatan Vladimir Putin disertai dengan masuknya secara besar-besaran mantan personel KGB dan militer disebut "*siloviki*" ke posisi kekuasaan dan otoritas di sektor politik dan ekonomi (Rivera & Rivera, 2014). *Siloviki* berperan penting di dalam pemerintahan Rusia karena mereka adalah formula yang sangat ampuh untuk menggeser kekuasaan oligarki yang telah lama mendominasi dan merugikan negara dalam pemerintahan era Yeltsin (Belton, 2021). Kelompok ini terdiri dari berbagai agen intelijen maupun militer yang berasal dari *Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti* (KGB) Rusia yang kini berubah menjadi *Federal Security Service* (FSB). Kelompok tersebut memiliki visi dan kepentingan yang sama untuk kejayaan Rusia, sehingga Putin tidak bekerja sendirian, akan tetapi bersama *siloviki* (Tsauro, 2016).

Kebangkitan dari *siloviki* terkontekstualisasi dalam kerangka sistem politik pasca Soviet dan dalam mekanisme rekrutmen elit. Suatu fenomena di mana peningkatan politisi dengan latar belakang militer dan keamanan dievaluasi sebagai anti-demokrasi dalam pandangan munculnya "*military beyond politics*" ketika Putin menggantikan Yeltsin sebagai Presiden pada tahun 1999 (Illarionov, 2009).

Walaupun sebenarnya pada masa Yeltsin sendiri *siloviki* ini sudah mulai mendapatkan posisi dan kekuatan pada politik Rusia. Pada masa Yeltsin, penunjukan (pemberian) jabatan politik sangat dipersonalisasi dan ditentukan berdasarkan konstruksi dan kombinasi taktis oleh Presiden Yeltsin yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan yang terfokus pada dirinya sendiri. Hubungan pribadi dan loyalitas adalah faktor utama penunjukan politik di bawah Yeltsin, yang rezimnya berpusat dengan apa yang disebut "*The Family*". Ini termasuk oligarki yang kuat seperti Boris Berezovskii dan Roman Abramovich, begitu juga sosok seperti kepala administrasi kepresidenan pada masa Yeltsin, Aleksander Voloshin dan Putrinya Yeltsin, Tatyana Dyachenko (Meier, 1999). Dapat dilihat bahwa sistem politik dan rekrutmen elit yang hadir pada masa Yeltsin terfokus pada personalisasinya yang kemudian sistem ini diwarisi oleh Putin sebagai Presiden Federasi Rusia pada tahun 1999. Namun, presiden yang diciptakan oleh Yeltsin tidak terbuka kepadanya. Para oligarki seperti Mikhail Khodorkovsky dan Vladimir Gusinsky menolak untuk tunduk kepada Putin merupakan kasus ketika para oligarki yang telah membantu Yeltsin dan bahkan membantu kampanye politiknya Putin pada pemilihan Presiden tahun 2000 merasa lebih kuat daripada negara dan pemerintah. (Saragih, 2008).

Hal inilah yang membuat Putin tidak punya pilihan selain mengandalkan, setidaknya sebagian mereka yang mewakili kekuatan angkatan. Putin hanya memiliki lima bulan pengalaman dalam politik federal dan tidak memiliki pemerintahan bayangan siap pakai yang dapat dijalankan sebagai mesin negara (Kryshtanovskaya & White, 2003). Dengan demikian, selain mempertahankan tokoh-tokoh kunci era Yeltsin, Putin membentuk pemerintahannya dengan mengandalkan orang-orang tepercaya yang pernah bekerja dengannya sebelumnya. Beberapa posting profil tinggi diberikan kepada mantan rekannya dari KGB Leningrad dan kepada petugas FSB lainnya, beberapa di antaranya pernah bertugas di bawah jabatannya sebagai Direktur FSB dari Juli 1998 hingga 1999. Mantan Menteri Pertahanan Rusia dan Deputy Perdana Menteri Sergei Ivanov dan asisten presiden Viktor Ivanov adalah contoh menonjol dari profil tinggi pejabat yang merupakan mantan KGB pada masa pemerintahan awal Putin (Bremmer & Charap, 2007). Penunjukkan para *siloviki* ke dalam kerangka pemerintahan, politik dan ekonomi Rusia merupakan tindakan elitisme, yang berguna untuk mengidentifikasi dan mempromosikan aneka kondisi yang menguatkan efektivitas Elit.

Istilah *Siloviki* berasal dari frase *silovye struktury* yang berarti struktur angkata bersenjata (*forces structure*). *Siloviki* atau *silovik* (untuk individu). Penggunaan *siloviki* berasal dari frasa “*institutions of force*” (Rusia: *силовые структуры*), yang muncul di awal era Boris Yeltsin (awal 1990-an) untuk menunjukkan layanan berseragam gaya militer, termasuk dinas militer, polisi, Kementerian Dalam Negeri, FSB dan beberapa struktur lainnya. Istilah serupa lainnya adalah “*securocrat*” (petugas penegak hukum dan intelijen). Sedangkan Daniel Treisman mengusulkan istilah “*silovarch*” (*silovik* dan *oligarch*) (Treisman, 2007).

Siloviki sebagai kelompok elit memiliki pengalaman sebagai penindas. Represi dan operasi merupakan keahlian mereka, *siloviki* sendiri merupakan elemen yang tidak demokratis dan sekarang mereka sebagai birokrat telah berhasil mengambil alih pemerintahan Rusia dari dalam berkat kemampuan organisasi yang hebat dan keahlian mereka sebagai eks KGB dan militer. Rusia yang mengalami demokratisasi dan sebagaimana juga menurut Huntington bahwa transisi demokrasi membawa elemen militer (*siloviki*) memasuki politik. Oleh sebab itu, dengan elemen yang tidak demokratis memasuki politik demokratisasi dan konsolidasi demokrasi secara keseluruhan terancam gagal.

Dalam kasus Rusia, demokratisasi yang terjadi tidak pernah mengalami konsolidasi melihat bahwa masyarakat sipil tidak berperan pada arah politik kontemporer Rusia. Melainkan yang terjadi adalah kompromi antara para elit; *The Family*, oligarki, *nomenklatura* dan *siloviki*. Dengan naiknya Vladimir Putin, *siloviki* telah muncul sebagai rulling class mengalahkan kelompok elit lainnya. dan dengan naiknya rezim *siloviki* demokrasi Rusia menjadi terancam.

Berdasarkan uraian di atas, Pemberian peran kepada *siloviki* oleh Vladimir Putin baik dibidang politik, militer dan ekonomi menjadi penempatan strategis dalam memastikan genggamannya pada kekuasaan dan dampaknya terhadap proses demokratisasi di Rusia. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikan uraian tersebut sebagai pembahasan bagaimana peran kelompok elit *siloviki* pada politik kontemporer Rusia.

2. Method

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang nantinya akan membantu penulis untuk menjelaskan kondisi atau fenomena yang ada, seperti proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan penelitian Studi Literatur atau Kepustakaan (*Library Research*). Studi Literatur adalah sebuah pendekatan penelitian di mana teknik pengumpulan informasi dan data dilakukan dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah dsb. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Pada riset pustaka (*library research*), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian (Zed, 2014).

3. Result and Discussion.

Peneliti memamparkan empat pokok pembahasan antara lain ialah Demokratisasi Rusia, Naiknya Putin, Tandemokrasi serta Pengaruh Politik *Siloviki* dan Demokrasi Rusia. Maka berdasarkan empat pembahasan tersebut, peneliti akan memaparkan bagaimana peran kelompok elit *Siloviki* pda politik kontemporer Rusia.

Demokratisasi Rusia

Boris Yeltsin sebagai Presiden Rusia mengawal Rusia kepada tahapan proses demokratisasi yang lebih lanjut. Yeltsin membawa Rusia lepas dari Uni Soviet dengan penandatanganan *Belovezha Accords*, yang tidak lama kemudian terjadinya desolusi Uni Soviet pada 26 Desember 1991 (Alkatiri, 2007). Pada titik ini Rusia

tidaklah lagi Uni Soviet, di mana Rusia adalah negara demokrasi yang melaksanakan pemilihan umum multi-partai. Rusia di bawah Yeltsin memasuki tahap transisi dan konsolidasi pada demokratisasi Rusia.

Pada sisi lain, sebagai salah satu ciri rezim pasca totaliter (Rusia), adalah tidak adanya pluralisme terorganisir di Rusia menghambat “*pacted transition*” di mana setelah runtuhnya Uni Soviet, aturan utamanya tidak ditentukan. Dengan tidak adanya konsensus mengenai prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat dan perekonomian lebih lanjut menumbuhkan ketidakpastian dan menghambat konsolidasi sistem demokrasi.

Meskipun ketidakhadiran dari aturan main baru ini menjadi permasalahan utama pada tahun awal demokrasi Rusia yang sedang masa transisi, perlu kilas balik sedikit untuk mengidentifikasi ciri dari proses demokratisasi ini. Transisi yang dialami oleh Rusia dapat dianalisis dengan menggunakan proses demokratisasi dari Huntington.

Pada masa-masa transisi yang krusial ini Alfred B Evans menyebutkan masa Yeltsin terfokus pada karakteristik nasionalisme liberal Rusia. Dengan karakteristik dari politik Rusia yang ada pada masa Yeltsin dapat dideskripsikan sebagai berpaling dari “*empire-building*” (membangun kekaisaran) Uni Soviet (Evans, 2008). Evans lebih lanjut menyampaikan bahwa transisi demokrasi Rusia sebagai dangkal. Dapat ditinjau transisi dari demokrasi Rusia dalam beberapa aspek penting salah satunya sudah penulis paparkan, bagaimana adanya kehampaan konstitusi Rusia pada tahun 1991-1993 membuat Rusia sebagai negara demokratis masih memberlakukan hukum Soviet.

Meskipun Boris Yeltsin gagal memperdalam atau bahkan mengkonsolidasikan demokrasi, pada akhir masa jabatannya, pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif untuk parlemen dan presiden telah dilaksanakan, pers yang bebas telah ada, banyak partai politik telah terbentuk, masyarakat sipil telah tumbuh, dan tingkat federalisme bertahan (McFaul, 2021).

Pada saat yang sama, Yeltsin membuat keputusan yang melemahkan konsolidasi demokrasi dan membuka jalan bagi pemulihan otokratis di masa depan. Membubarkan Kongres Rusia melalui dekret adalah sebuah kesalahan yang memaksanya beberapa minggu kemudian untuk menggunakan kekerasan. Hal ini juga menghasilkan konstitusi superpresidensial yang diterapkan Putin secara efektif untuk memutarbalikkan demokrasi.

Kesalahan kritis kedua yang dilakukan Yeltsin adalah program pinjaman untuk saham. Untuk mengumpulkan sumber daya agar dapat terpilih kembali pada tahun 1996, Yeltsin dan pemerintahannya mengambil dukungan keuangan “pinjaman” dari oligarki terkaya di Rusia dengan imbalan saham di perusahaan-perusahaan yang besar dan menguntungkan.

Kesalahan ketiga adalah kegagalan Yeltsin membubarkan KGB. Meskipun badan ini terpecah menjadi cabang intelijen eksternal dan internal, reformasi yang lebih substansial tidak pernah dilakukan. Dengan menjaga organ utama penindasan era Soviet ini tetap utuh, Yeltsin memberikan Putin, yang juga mantan perwira KGB, alat yang ampuh untuk memulihkan kediktatoran setelah tahun 2000.

Boris Yeltsin sendiri gagal dalam mengkonsolidasikan demokrasi Rusia. Konsolidasi demokrasi merupakan proses mendewasanya demokrasi secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh aktor politik. Hal ini sama sekali tidak terjadi di Rusia. Demokrasi Rusia merupakan one man show yang diperankan oleh Yeltsin, atau menurut pendapat Maria Snegovaya di mana alih-alih mengalami transisi demokrasi, Rusia justru mengalami periode kelemahan otoriter (masa Yeltsin) (Snegovaya, 2023).

Dengan demikian, demokratisasi Rusia mengalami arus putar balik sebagaimana kemungkinan yang dipaparkan oleh Huntington. Pembalikan arah ini terjadi karena; pertama, gaya politik Yeltsin yang membutuhkan kendali besar dan kedua, kegagalannya dalam mengubah tatanan personal dan instansi era Soviet. Aspek kedua menjadi hal yang berdampak pada demokrasi Rusia. Karena hampir setiap struktur eksekutif, perwakilan, regional, ekonomi, dan militer di Rusia tetap berada di tangan mereka yang menjalankannya ketika Uni Soviet masih ada (Kramer, 2019).

Kegagalan Yeltsin untuk melepas dan mengasosiasikan dirinya dari elemen-elemen non demokratis inilah yang menjadi kesalahan terbesar dalam masa jabatannya, yang juga menyebabkan kegagalan demokrasi Rusia. Walaupun arus balik demokratisasi tidak sepenuhnya terjadi pada masanya, Yeltsin sendiri telah memberikan pondasi yang dibutuhkan oleh Vladimir Putin untuk menciptakan rezim non demokratis hibrida. *Siloviki* muncul sebagai kekuatan elit terkuat mengalahkan para oligarki dan the family dalam jangka waktu yang singkat.

Hal ini tidaklah mengherankan ketika dianalisis dengan teori elit mosca, para *siloviki* telah bertransformasi menjadi birokrat kantor dari personal militer dan keamanan negara. Ulah dari reformasi Yeltsin sendiri yang memberikan mereka jabatan dan kesempatan untuk mengambil alih Rusia dari dalam. Para oligarki dan *the family* hanyalah elit-elit bisnis dan staf ahli administrasi Yeltsin. Sedangkan para *siloviki* sekarang berada di berbagai instansi pemerintahan baik; sebagai staf kepresidenan, kementerian, militer dan badan keamanan negara lainnya. Bahwa *siloviki* sudah berada pada lingkaran dalamnya Yeltsin sejak 1993

dengan jumlah sekitar 11 persen sampai dengan 17 persen pada 1999 (Kryshstanovskaya & White, 2009).

Naiknya Putin

Presidensi Vladimir Putin dihadapkan dengan keadaan Rusia yang lemah pada bidang ekonomi dan politik. Pada bidang ekonomi Putin memandang sumber permasalahan berada pada liberalisasi dan privatisasi, Putin dengan terang-terangan menunjuk ke oligarki sebagai masalah dari perekonomian Rusia (Saragih, 2008).

Ironisnya, Boris Berezovsky, seorang oligarki yang sangat mendukung pilihan Yeltsin terhadap Putin, melarikan diri setelah Putin terpilih dan menyerahkan kendali jaringan televisi terbesar Rusia ORT, ke Kremlin. Pengusaha Vladimir Gusinsky juga beremigrasi, akhirnya kehilangan perusahaan televisinya NTV dan aset lainnya. Putin bergerak untuk semakin melemahkan kekuatan oligarki dengan penangkapan Mikhail Khodorkovsky pada tahun 2003, orang terkaya Rusia pada saat itu, yang mendanai partai politik dan individu yang tidak setia kepada Kremlin. Beberapa perusahaan oligarki yang bahkan bagian dari *The Family* yang dinasionalisasi: Yukos, Sibneft, Gazprom, LukOil, dan lainnya (Lavelle, 2004).

Pada hal ini terdapat contoh-contoh konkrit yang dapat penulis sampaikan: Putin menunjuk Igor Sechin sebagai ketua Rosneft seorang *silovik*. Di mana hubungan antara para *siloviki* semakin kuat karena sebelum Sechin ditunjuk sebagai ketua Rosneft ia menikahkan putrinya dengan putranya Vladimir Ustinov Ketua Jaksa Penuntut dari Kejaksaan Agung Rusia yang sedang menangani kasus Yukos.

Tidaknya Sechin, ada juga *siloviki* lainnya yang diberikan kendali terhadap berbagai perusahaan milik negara seperti:

- Viktor Ivanov (KGB) ketua dewan direksi dari perusahaan industri senjata negara Almaz-Antei sejak 2002 dan ketua dewan direksi perusahaan industri pesawat negara Aeroflot sejak 2004.
- Sergey Naryshkin (KGB) anggota dewan direksi Sovkomflot (perusahaan perkapalan negara) sejak 2004, wakil ketua dewan direksi Rosneft sejak 2004, dan ketua dewan direksi Channel One (saluran televisi negara) sejak 2004.

Melalui teori elit Mosca, bahwa terjadinya pergantian elit yang tidak inheren dan berdasarkan keterampilan terbukti terjadi di Rusia. Pergantian elit dari para oligarki kini menjadi *siloviki*. Penangkapan, pengasingan dan nasionalisasi menjadi nasib Berezovsky, Gusinsky dan Khordokovsky. Sedangkan para *siloviki*, Sechin, Ivanov dan Naryshkin kini menjadi pemegang kekuatan ekonomi di Rusia. Perampasan kekuasaan dari oligarki telah mempercepat peralihan kekuasaan di Rusia ke arah *siloviki*.

Penerima manfaat utama dari pembongkaran Yukos adalah Rosneft yang dewannya dipimpin oleh wakil kepala staf kepresidenan dan pemimpin klan *siloviki* Igor Sechin. Rosneft kini menjadi perusahaan minyak terbesar di Rusia, dengan kapitalisasi \$78 miliar dan produksi tahunan sekitar 100 juta ton (Yasmann, 2007). Kremlin juga membentuk *United Aviation Corporation*, yang menggabungkan produsen pesawat sipil dan militer terkemuka seperti MiG, Sukhoi, dan Tupolev. *United Aviation* dipimpin oleh Sergei Ivanov. Dua bulan kemudian, Kremlin menindaklanjuti dengan *United Shipbuilding Company* yang menggabungkan semua pembuat kapal sipil dan angkatan laut Rusia. *United Shipbuilding* dipimpin oleh Naryshkin.

Dilansir dari hasil wawancara di *Financial Times* bahwa alasan mengapa para *siloviki* mencuri dalam skala besar karena mereka menganggap diri mereka sebagai perwakilan negara, dan merasa bahwa menjadi lebih miskin dari sekelompok pengusaha adalah suatu penghinaan, bahkan penghinaan terhadap negara (Lieven, 2022). *Siloviki* secara akurat digambarkan sebagai kelompok yang sangat korup, namun korupsi yang mereka mempunyai ciri-ciri khusus. Patriotisme adalah ideologi mereka dan pembenaran diri atas kekayaan mereka yang melimpah.

Sekarang pembahasan memasuki pada bidang politik dan dampak *Siloviki* terhadap demokrasi Rusia. Meskipun Rusia adalah negara demokrasi yang memiliki pemilu dan partai politik skor atau indeks demokrasi yang ada di Rusia terhitung pada tahun 2004 adalah 5.25 dengan indikasi *partly free*. Menurut *Freedom House*, demokrasi Rusia pasca perang dingin dari tahun 1991 hingga 2002 Rusia masih terindikasi sebagai *partly free* namun mengalami penurunan menjadi *not free* pada tahun 2003-2004.

Upaya-upaya dari *siloviki* untuk memperkuat genggamannya mereka di seluruh penjuru Rusia, elit-elit lokal dilemahkan dengan kebijakan kandidasi dari Kremlin yang sulit ditolak elit lokal membuat otonomi daerah Rusia tidak berjalan sepenuhnya dengan munculnya *parachutist* Kremlin menduduki jabatan-jabatan gubernur regional. Bahwa reformasi birokrasi ini guna upaya untuk memperkuat elit pusat dengan menerjunkan birokrat-birokrat pusat ke daerah. Mosca mengtakan bahwa para birokratlah yang akan muncul sebagai kelompok elit yang kuat karena merekalah yang mengatur distribusi sumber daya dan nilai yang ada. Dalam hal ini Putin telah menerjunkan birokrat-birokrat yang dipercayainya untuk mensentarisir komando. Dengan juga data bahwa terdapat 21,4% gubernur yang ditunjuk Putin antara tahun 2005 dan 2008 berasal dari *forces structures* (*Siloviki*) (Rivera & Rivera, 2014).

Menurut Olga Kryshtanovskaya ahli sosiologi Rusia, pada tahun 2003 ia menemukan bahwa mayoritas mantan pejabat KGB dan personel militer menuju dan atau berada pada pemerintahan. Pada tahun 2007, ia memperkirakan bahwa hanya 26% personel militer yang saat ini berada di Kremlin adalah anggota kelompok *Siloviki*, meskipun angka ini meningkat menjadi 78% jika semua personel yang memiliki hubungan dengan militer atau badan keamanan dihitung. Pada Februari 2008, jumlah siloviki di semua posisi pemerintah telah mencapai 42 persen, dan keterwakilan di dunia usaha memiliki angka tersebut meningkat hingga hampir 40 persen. Berdasarkan data Olga Kryshtanovskaya dan Stephen White, pada dewan manajemen dari 68 perusahaan negara terpenting Rusia, hampir 74 persennya merupakan perwakilan pemerintah; di bawah 8 persen adalah anggota Administrasi Presiden, dan 26 persen (dalam beberapa kasus juga mewakili pemerintah dan administrasi presiden) adalah *siloviki*.

Dengan demikian, demokratisasi Rusia terus mengalami arus balik karena Rusia tidak lagi dijalankan oleh kekuatan demokratis. *Siloviki* adalah *strongmen* yang menginginkan Rusia yang kuat dan stabil. Rusia yang tidak dapat diperjual-belikan, suatu visi yang ideal mengingat Rusia yang terobrak-abrik dengan liberalisasi ekonomi dan oligarki masa Yeltsin.

Namun, *siloviki* dalam merealisasikan hal ini hanya mengetahui satu cara: kendali penuh, opresi dan represi. Di mana *siloviki* mengambil peran yang tidak demokratis. Tugas mereka bukanlah untuk mewakili beragam kepentingan masyarakat, namun untuk melayani negara, melaksanakan tugasnya dan menjaga asetnya.

Tandemokrasi

Dengan berakhirnya masa jabatan Vladimir Putin sebagai Presiden Federasi Rusia pada tahun 2008, Rusia kembali lagi mengadakan pemilihan presidensialnya. Pemilu tersebut dimenangkan oleh kandidat dari Partai *United Russia*, Dmitry Medvedev.

Pada tahun 2008, indeks demokrasi Rusia mengalami titik terendah dari sebelumnya di masa Putin dengan angka terendah pada skor 5.25, dan di masa akhir jabatannya mencapai skor 5.96. Di masa Dmitry Medvedev demokrasi Rusia beranjak dari angka 5.96. pada tahun 2008 hingga mencapai angka 6.18 pada tahun 2012. Terdapat penurunan yang bertahap pada skor demokrasi Rusia pada masa jabatannya Medvedev, jika dibandingkan dengan Putin dari tahun 2003 Rusia masih berada pada 4.96, di tahun 2004 pada 5.25 kemudian pada tahun 2005 secara drastis menjadi 5.61. Seterusnya angka tersebut meningkat dengan 0.10 poin hingga pada tahun 2008 Rusia pada *Nations in Transit* skor demokrasi mencapai 5.96. Hal ini sama sekali tidak mengubah bahwa Rusia masih merupakan negara yang tidak bebas.

Masa kepresidenan Dmitry Medvedev pada tahun 2008–2012, merupakan dwitunggal yaitu; Dmitry Medvedev sebagai presiden dan Vladimir Putin sebagai perdana menteri, suatu kepemimpinan dwitunggal untuk yang pertama kalinya terjadi pada politik Rusia. bergandengannya elemen liberal-demokratis (Medvedev) dan *siloviki*-tidak demokratis (Putin) mendapatkan julukan di media Rusia sebagai *tandemocratia* atau *tandemocracy*. Gabungan dua kata yaitu; *tandem* (berdua/bersama) dengan *democracy* (demokrasi).

Menurut Ilya Viktorov, terdapat kesepakatan antara Putin dan Medvedev sebelum memenangkan pemilu 2008. Medvedev harus setuju dengan Putin mengenai semua keputusan mengenai penunjukan posisi penting. Selain itu, Medvedev secara umum mempunyai kebebasan untuk menjalankan kebijakannya. Namun demikian, hal ini memang merupakan pembagian kekuasaan, meskipun secara khusus bersifat Rusia. Tandemokrasi adalah hal baru di sejarah politik Rusia dengan tradisi autarkinya (Viktorov, 2014).

Namun, inilah mengapa sistem politik Rusia berkerja berbeda dengan sistem lainnya. Idealnya, institusi harus meringkai sistem *checks and balances*. Namun kenyataannya, tidak ada pembagian kekuasaan di Rusia, artinya bahwa kelompok informal harus menjalankan peran ini, untuk membentuk sistem *checks and balances*. Jadi pada masa Medvedev terdapat *check and balances* yang dilakukan oleh dua kelompok elit yaitu; para sipil/*civiliki* (Medvedev) dan para *Siloviki* (Putin).

Dengan Medvedev sebagai Presiden terdapat penurunan pada jumlah *siloviki* pada birokrasi tinggi Rusia. Penurunan jumlah dari *siloviki* dapat dilansir dengan data dari Olga Kryshtanovskaya pada akhir masa jabatan Putin, *siloviki* berada pada persentase 42 persen sedangkan di bawah Medvedev proporsi *siloviki* menurun dan pada tahun 2011 berjumlah sekitar 20% dari total jumlah birokrasi tinggi Rusia.

Konsolidasi demokrasi pada masa Medvedev tidak terjadi, melainkan yang terjadi adalah kompromi antar elit *siloviki* dan *civiliki*, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya inilah bentuk dari *check and balances* pada sistem politik Rusia. Dengan demikian, demokratisasi Rusia pada Medvedev bukanlah transisi demokrasi juga. Meskipun beranjak dari pemerintahan yang otorkatis menjadi tandemokrasi.

Tidak hanya itu, Medvedev terbukti gagal dalam meningkatkan demokrasi Rusia di mana dengan data dari *Freedom House* indeks demokrasi Rusia mencapai titik 6,18 semakin mendekati angka 7 sebagai batas tidak demokratis sama sekali. Rusia yang dipimpin oleh sosok sipil-liberal ternyata tidak dapat

menyeimbangkan ataupun mengganti elit-elit *siloviki* dari kekuasaan, serta tentunya juga tidak berpandang sebelah bahwa Medvedev juga datang dari lapisan elit-elit yang sama bukan sepenuhnya dari luar rezim, sirkulasi elit yang terjadi tidak berasal dari luar elit-elit yang sudah berkuasa di Rusia.

Pengaruh Politik Siloviki dan Demokrasi Rusia

Pada tahun 2012, Vladimir Putin kembali terpilih sebagai Presiden Federasi Rusia. Demokrasi Rusia beranjak pada angka 6.18 dan dengan status tidak bebas, kembalinya Putin merupakan indikasi besar bagaimana demokrasi Rusia akan beranjak dari titik ini.

Menurut Mark Galeotti “Jelas bahwa kembalinya Putin adalah hal yang baik bagi *siloviki* pada umumnya dan badan keamanan” (Whitemore, 2015). Kembalinya Putin, tidak sepenuhnya berarti pendisiplinan terhadap *Siloviki* yang dilihat sudah terlalu berlebihan dalam meraup kekayaan mereka. Melainkan Putin kembali untuk memastikan loyalitas dan efisiensi mereka sebagai mesin keamanan negara. Hal ini sangat mengindikasikan bahwa Putin sendiri membiarkan dan membolehkan transformasi dari penagruh politik siloviki itu sendiri, transformasi dari sekedar birokrat badan keamanan menjadi orang kaya dan elit-elit ekonomi dan politik Rusia.

Dengan mengikuti jejak mereka, *siloviki* telah muncul sebagai kekuatan elit yang kuat dan berkuasa pada politik kontemporer Rusia, mereka secara sistematis menduduki jabatan birokrasi dan keamanan negara dengan mudah mengambil alih kekuasaan karena pengalaman organisasi mereka yang kuat semasa KGB, memiliki mental dan kesadaran kelompok yang homogen. Meskipun mereka secara organisasi dan institusi negara sekarang terpecah-pecah *siloviki* tetap mendukung sesame *siloviki* untuk keamanan dan kestabilan negara dari variabel yang menurut mereka merugikan negara. Kualitas, keunggulan dan keahlian mereka inilah yang membuat *siloviki* hadir sebagai kelompok elit yang berkuasa.

Mosca mendefinisikan elit modern dalam kaitannya dengan keterampilan organisasi mereka yang unggul. Keterampilan ini sangat berguna dalam memperoleh kekuasaan politik dalam masyarakat birokrasi modern (Yetkin, 2008). Dalam kasus Rusia, *siloviki* naik sebagai kelompok elit berkuasa berkat administrasi yang dijalankan oleh Putin dari Kremlin dan *siloviki* lainnya yang terpecah diberbagai organisasi negara seperti: FSB, SVR, GRU, FSO, Rosgvardiya dan lain-lain mengikuti komando Putin.

Kembalinya Putin sebagai Presiden Rusia, menandai penguatan *siloviki*. Sebelumnya pada masa Kepresidenan Dmitry Medvedev jumlah siloviki jatuh ke angka 20%, kini dengan kembalinya Putin dan dengan data dari Olga Kryshtanovskaya dengan proporsinya meningkat ke level 47%.

Meningkatnya *siloviki* menjadi 47% merupakan mimpi buruk bagi demokrasi Rusia. Menurut Olga Kryshtanovskaya, hal ini sama sekali bukan karena permintaan masyarakat melainkan, karena kekuasaan tertinggi membutuhkannya (Putin) (Viktorov, 2014).

Meningkatnya kembali peran politik *siloviki* bukan merupakan hal yang populer dikalangan masyarakat Rusia terbukti dengan demonstrasi besar pasca pemilu 2012. Aneksasi Krimea oleh Rusia membawa opini publik dan revolusi patriotik yang mendongkrak popularitas Putin, berkontribusi pada meningkatnya pengaruh *siloviki* karena salah satu penasihat terdekat Putin, Nikolai Patrushev merupakan sosok yang menasihatinya untuk menganekasasi Krimea (Viktorov, 2019). *Siloviki* menggunakan aneksasi Krimea sebagai upaya mereka untuk meningkatkan kembali popularitas rezim yang melonjak hingga melebihi 85 persen (Volkov, 2016).

Pada tahun 2018, skor demokrasi Rusia berdasarkan *Freedom House, Nations in Transit* berada pada angka 7 batas dari perkembangan demokrasi terendah. Dengan status kebebasan secara global pada angka 20 berindikasi not free dan *Freedom House* mengategorikan Rusia sebagai *consolidated authoritarian regime*.

Kembalinya Putin sebagai Presiden dan menguatnya jumlah *siloviki*, serta kembali Rusia ke era represi seperti masa Soviet membuat demokrasi Rusia tidak lagi dapat diselamatkan. Tidak ada lagi keraguan bahwa demokratisasi Rusia tidaklah berjalan, demokrasi Rusia hanya sebatas prosedural legitimasi bagi Putin, *Siloviki* dan *United Russia*. Tidak hanya itu, meningkatnya kehadiran *siloviki* juga membawa konsekuensi lain yaitu pada budaya politik Rusia. Mereka membawa masuk pola pikir dinas keamanan yang mencurigai dan *inward-looking* yang dibentuk oleh sejarah Soviet.

Meski dipahami bahwa *siloviki* berjalan pada tujuan yang sama dengan apa yang disebut Mark Galeotti sebagai “*The Siloviki Consensus*” (Galeotti, 2022). Di mana Rusia berhak dianggap sebagai *great power*, dimana dunia Barat memiliki maksud untuk mengancam Rusia, negara yang kuat dan tersentralisir diperlukan untuk mempertahankan dan memajukan kepentingan Rusia, dan diperlukan lembaga intelijen dan keamanan yang kuat dan mandiri.

Tidak hanya itu, berdasarkan Mark Galeotti Vladimir Putin sendiri lebih mempercayai briefing dari badan intelijen luar negerinya (SVR) daripada para diplomat di Kementerian Luar Negeri. Adapun data dari Galeotti persentase pertemuan antara Putin dan siloviki: Patrushev (SB) 29%, Shoigu (MO) 23%, Bortnikov (FSB) 17%, Naryshkin (SVR) 11%, Kolokoltshev (MVD) 5%, Zoltov (Nat. Gd.) 5%, Kostyukov (GRU) 1%, dan lainnya 9%.

Siloviki telah hadir pada politik kontemporer Rusia sebagai kelompok elit berkuasa (*Rulling Class*) pencapaian mereka telah terhimpun dengan kumulasi kekuatan dan pengaruh pada budaya politik dan ekonomi Rusia. *Siloviki* telah bertransformasi dari masa ke masa, dari militer dan KGB yang kehilangan posisi dan kekuatan mereka setelah runtuhnya Uni Soviet, menjadi birokrat kecil-kecilan pada masa Yeltsin, berhasil melaksanakan elite turnover pada masa Putin tahun 2000an, sirkulasi elit yang tidak sepenuhnya tidak tergantikan pada masa Medvedev dan kembali mendominasi besar-besaran dengan kembalinya Putin 2012. Transformasi mereka yang awalnya hanya memasuki hal-hal politik dalam negeri, keamanan dan militer telah berhasil memasuki sektor ekonomi dengan menjadi kepala-kepala di perusahaan milik negara dan swasta. Namun kini, berdasarkan Galeotti dan Kryshstanovskaya *Siloviki* telah bertransformasi sekali lagi menjadi “*The New Nobility of Russia*”.

4. Conclusion

Terdapat transformasi yang dialami oleh *siloviki* dari sekedar birokrat intelijen dan tentara menjadi, pebisnis dengan menduduki jabatan pada dewan direksi atau memimpin perusahaan-perusahaan milik negara. Di mana kemudian *siloviki* berhasil bertransformasi menjadi aristokrasi baru Rusia.

Kehadiran *siloviki* sebagai kekuatan elit politik yang mendominasi Rusia menguatkan pepatah “*once a checka always a checka*”. Peran dari kelompok elit *siloviki* pada politik kontemporer Rusia adalah layaknya strongmen, yang membenteng hukum dan politik sesuai keinginan mereka demi menjaga keamanan dan kestabilan.

References

- Alkatiri, Zeffry. 2007. *Transisi Demokrasi di Negara Federasi Rusia: Analisa Perlindungan HAM*. Depok: Fakultas Ilmu Budaya UI.
- Anderson, Julie. 2006. “The Chekist Takeover of the Russian State”. *International Journal of Intelligence and Counter-Intelligence*. Vol. 19 No. 2
- Arugay, Aries A. 2021. “Democratic Transitions”, *The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies*. Cham: Springer International Publishing.
- Bader, Max dan Carolien van Ham. 2015. “What explains regional variation in election fraud? Evidence from Russia: a research note”. *Post-Soviet Affairs*. Vol 31 No 6
- Belton, Catherine. 2021. *Putin’s People: How The KGB Took Back Russia and Then Took on The West*. Dublin: William Collins.
- Bremmer, Ian and Samuel Charap. 2007. “The Siloviki in Putin’s Russia: Who They Are and What They Want”. *The Washington Quarterly*. Vol. 30. No. 1
- Dawisha, Karen. 2014. *Putin’s Kleptocracy: Who Owns Russia?*, New York: Simon and Schuster.
- Evans, Alfred B. 1994. “Yeltsin and Russian Nationalism”. *The Soviet and Post-Soviet Review* Vol 21 No 1.
- _____. 2008. “Power and Ideology: Vladimir Putin and the Russian Political System”. *Carl Beck Papers The in Russian & East European Studies* No. 1902.
- _____. 2011. “The failure of democratization in Russia: A comparative perspective”. *Journal of Eurasian Studies* Vol. 2
- Freedom House. 2004. “2004 Annual Report”. *Freedom House Annual Report*.
- Fukuyama, Francis. 1989. “The End of History?”. *The National Interest*, Vol. 16. <https://www.jstor.org/stable/24027184>.
- Galeotti, Mark. 2016. “Putin’s Hydra: Inside Russia’s Intelligence Services”. *ECFR*. Volume 169.
- _____. 2019. “The Intelligence and Security Services and Strategic Decision-Making”. *Security Insights* No. 30
- Goldfarb, Alex and Marina Litvinenko. 2007. *Death of a Dissident: The Poisoning of Alexander Litvinenko and the Return of the KGB*. New York: Free Press.
- Higley, John. 2018. “Continuities and Discontinuities in Elite Theory” dalam Heinrich Best and John Higley, *The Palgrave Handbook of Political Elites*. London: Palgrave MacMillan.
- Huntington, Samuel P. 1992. “How Countries Democratize?” *Political Science Quarterly* Vol. 106 No. 4
- _____. 1993. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Illarionov, Andrei. 2009. “Reading Russia: The Siloviki in Charge”. *Journal of Democracy*. Vol. 20 No. 2
- Kohn, Hans. 2006. *Basic History of Modern Rusia*. Jakarta: Bhratara.
- Kramer, Mark. 2019. “The Soviet Legacy in Russian Foreign Policy”. *Political Science Quarterly* Vol. 2 No. 134.

- Lynch, Allen C. 2005. *How Russia Is Not Ruled*. New York: Cambridge University Press.
- Mc Faul, Michael. 2001. *Russia's Unfinished Revolution Political Change from Gorbachev to Putin*. New York: Cornell University Press.
- _____. 2021. "Russia's Road to Autocracy". *Journal of Democracy*. Vol. 32 No. 4. <https://www.journalofdemocracy.org/articles/russias-road-to-autocracy/#f6>.
- Mosca, Gaetano. 2017. *The Rulling Class*. Sacramento: Creative Media Partners.
- Ottaway, Marina. 2013. *Democracy Challenged: The Rise of Semi-Authoritarianism*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Paxton, John. 2012. *Leaders of Russia and the Soviet Union: from the Romanov dynasty to Vladimir Putin*. New York: Routledge.
- Putnam, Robert D. 2004. *The Comparative Study of Political Elites*. Hoboken: Prentice Hall.
- Rentz, Bettina. 2007. "The Siloviki in Russian Politics: Political Strategy or a Product of the System?". *Russian Analytical Digest*. Vol. 7. No. 17.
- Rivera, David W. and Sharon Werning Rivera. 2014. "Is Russia a militocracy? Conceptual issues and extant findings regarding elite militarization" *Post-Soviet Affairs*. Vol. 30. No. 1.
- _____. 2018. "The Militarization of the Russian Elite under Putin". *Problems of Post-Communism*. Vol. 65. No. 4.
- Rochlitz, Michael. 2019. "The Return of the Siloviki: An Introduction". *Brill Russian Politics*. Vol. 4.
- Rosefielde, Steven & Stefan Hedlund. 2009. *Russia Since 1980*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sakwa, Richard. 2005. *The Rise and Fall of The Soviet Union 1917-1991*. London: Routledge.
- _____. 2008. *Russian Politics and Society*. Oxon: Routledge.
- _____. 2011. *The Crisis of Russian Democracy: Dual State, Factionalism and the Medvedev Succession*. Cambridge: University Press.
- Snegovaya, Maria and Alexander Lanoszka. 2022. "Fighting Yesterday's War: Elite Continuity and Revanchism". *SSRN Papers*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4304528.
- _____ and Kiril Petrov. 2022. "Long Soviet Shadows: The Nomenklatura Ties of Putin Elites". *SSRN Papers*. <https://ssrn.com/abstract=4012474>.
- _____. 2023. "Why Russia's Democracy Never Began", *Journal of Democracy*. Vol 34 No 3. <https://www.journalofdemocracy.org/articles/why-russias-democracy-neverbegan/>.
- Kryshtanovskaya, Olga and Stephen White. 2003. "Putin's Militocracy," *Post-Soviet Affairs*. Vol. 19. No. 4.
- _____. 2009. "The Sovietization of Russian Politics" *Post-Soviet Affairs*. Vol. 25 No. 4.
- Saragih, Simon. 2008. *Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks KGB*. Jakarta: Kompas.
- Service, Robert. 2009. *History of Modern Russia: From Tsarism to the Twenty-first Century*. London: Penguin Books.
- Susanto, Dwi. 2010. *Perubahan Politik di Negara-Negara Eropa Timur*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Viktorov, Ilja. 2014. "The Legacy of Tandemocracy" *Baltic Words: Centre for Baltic and East European Studies Journal*.
- _____. 2019. "Putin 4.0. Post-Crimea Elite Conflicts and Future Transition of Presidential Power in Russia". *Baltic Worlds*. Vol. 12
- Volkov, Denis. 2016. "Russian Elite Opion After Crimea". *Carnegie Moscow Center*.
- White, Stephen. 2008. *Politics and Groups in Putin's New Russia*. New York: Palgrave Macmillan.
- Yetkin, Deniz. 2008. "Elites, Power Sources dan Democracy". *Graduate School of Arts and Social Sciences. Sabanci University*.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.